

**KERJA SAMA PEMERINTAH JEPANG DAN
MYANMAR DI PROYEK PENGEMBANGAN
SPECIAL ECONOMIC ZONES (SEZs) THILAWA
YANGON**

Anmita Intan Fatimah,

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
anmitaintanf@gmail.com

Tyas Kurnianingsih

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura
tyaskrn678@gmail.com

Yenita Evayani

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
yenitaevayani@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan mengenai kerja sama Pemerintah Jepang dan Myanmar di proyek pengembangan SEZs Thilawa Yangon. Proyek ini dibangun sejak tahun 2013 melalui kerja sama antara pemerintah Jepang dan Myanmar dan adalah salah satu bentuk penyaluran bantuan ODA yang dilakukan oleh Jepang melalui kerja sama teknis antara kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,

dengan mendeskripsikan motif kerja sama yang dilakukan begitu pula proyek yang dikerjakan dari analisis kualitatif berbagai data yang didapatkan. Data diambil dari sumber *online* dari *website* resmi Kawasan Ekonomi Khusus Thilawa dan berupa buku, buletin, berita, beberapa dokumen terkait, dan artikel. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori liberalism untuk membantu menjelaskan mengenai kerja sama yang dilakukan kedua negara serta yang menjelaskan mengapa kerja sama keduanya dilakukan dan kepentingan kedua negara dalam proyek tersebut. Hasil penelitian yang didapat adalah Myanmar dapat mencapai cita-citanya memenuhi kebutuhan untuk membangun negara dengan perekonomian kota Thilawa yang modern dan berdaya saing tinggi sementara Jepang dapat mengarahkan para pebisnis Jepang untuk membuka perusahaan di Myanmar. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi para pembaca serta bermanfaat bagi dunia keilmuan untuk bahan kajian penelitian selanjutnya.

Kata kunci: Myanmar, Jepang, Thilawa, kerja sama internasional, *Special Economic Zone (SEZs)*.

ABSTRACT

This article describes the cooperation between the Governments of Japan and Myanmar in the Thilawa Yangon SEZs development project. This project was built in 2013 through cooperation between the governments of Japan and Myanmar and is a form of distribution of ODA assistance carried out by Japan through technical cooperation between the two countries. The research method used is a qualitative descriptive method, by describing the motives for the cooperation carried out as well as the projects carried out from the qualitative analysis of the various data obtained. The data is taken from online sources from the official website of the Thilawa Special Economic Zone and in the form of books, bulletins, news, related documents and articles. This study uses the concept of national interest and the theory of liberalism to help explain the cooperation carried out by the two countries as well as explaining why the cooperation between the two was carried out and the interests of the two countries in the project. The results obtained are that Myanmar can achieve its goals to meet the needs of developing the country with the modern and highly competitive economy of the city of Thilawa while Japan can direct Japanese businessmen to open companies in Myanmar. This research is expected to enrich knowledge for readers and be useful for the scientific world for material for further research studies.

Keywords: Myanmar, Japan, Thilawa, international cooperation, *Special Economic Zone (SEZs)*.

PENDAHULUAN

Zona Ekonomi Khusus (*Special Economic Zones/SEZ*) Thilawa Yangon merupakan kawasan ekonomi khusus yang sengaja dikembangkan dengan kebijakan tertentu di wilayah Yangon, Myanmar. Proyek ini dibangun sejak tahun 2013 melalui kerja sama antara pemerintah Jepang dan Myanmar. Berbagai pembangunan berstandar internasional telah dikembangkan oleh perusahaan kedua negara dengan nama Myanmar Japan Thilawa Development Limit seperti pembangunan pelabuhan dan jalan besar. Melalui *Official Development Assistance* (ODA) yang disalurkan oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA)¹, Pemerintah Jepang dan Myanmar berkomitmen untuk menyelesaikan proyek pembangunan Zona Ekonomi Khusus di Thilawa tersebut (Shafira, 2021). ODA merupakan program bantuan yang dikeluarkan oleh Jepang kepada berbagai negara berkembang.

Pembangunan proyek *SEZ* Thilawa Yangon yang merupakan kerja sama yang hanya dilakukan antara pemerintah Jepang dan Myanmar adalah salah satu bentuk penyaluran bantuan ODA yang dilakukan oleh Jepang. Myanmar merupakan salah satu negara yang menerima bantuan ODA dari Jepang. Bantuan yang diberikan oleh Jepang ini terdiri dari bantuan yen, hibah, dan kerja sama teknis. Bantuan yen adalah bantuan pinjaman dana oleh Jepang dengan suku bunga yang rendah. Selanjutnya, hibah adalah pinjaman yang diberikan oleh Jepang tanpa adanya keharusan untuk mengembalikan uang tersebut. Sementara itu, kerja sama teknis merupakan bantuan dalam bentuk pengembangan sosial ekonomi negara-negara berkembang dan disalurkan melalui JICA. (Shafira, 2021)

¹ JICA merupakan lembaga pemerintahan Jepang yang bertugas untuk memberikan sebagian besar bantuan *Official Development Assistance* (ODA) milik Jepang.

Melalui JICA, Jepang memberikan bantuan sebesar 51 miliar yen² untuk pembangunan proyek zona ekonomi khusus di Thilawa tersebut. Selain itu, Jepang juga membantu renovasi infrastruktur Myanmar yang dapat mengurangi angka kemiskinan di kawasan Asia Tenggara. Jepang dan Myanmar berkomitmen untuk mengembangkan perekonomian Myanmar serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Myanmar melalui pembangunan proyek tersebut. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan dan mengoperasikan kawasan industri di zona ekonomi khusus yang terletak di pinggiran kota Yangon untuk menarik investasi perusahaan ke daerah tersebut. Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara yang berkelanjutan melalui pengembangan industri dan penciptaan lapangan kerja. (Seekins, 2015)

Jepang dan Myanmar pertama kali bekerja sama pada tahun 1954 guna membangun industrialisasi Myanmar melalui program reparasi perang yang harus dilakukan oleh Jepang. Saat itu, Jepang berkewajiban untuk mendanai pembuatan barang-barang infrastruktur Myanmar hingga tahun 1980-an dengan bantuan pinjaman yen. Tahun 1980-1988 Myanmar adalah salah satu negara dari sepuluh negara dengan pinjaman ODA paling besar. (Thant, 2021). Namun, pada tahun 1988 hingga 2011 bantuan tersebut terhenti akibat adanya kudeta yang dilakukan oleh pihak Junta Militer terhadap negara Myanmar. Pada tahun 2010-2011 setelah reformasi politik, Jepang mulai mengeluarkan kembali kebijakannya untuk menormalkan hubungan bilateral dengan Myanmar. Pada saat pembangunan zona ekonomi khusus inilah, Jepang dan Myanmar kembali bekerja sama melalui bantuan ODA yang diberikan oleh Jepang.

Kawasan Thilawa dianggap sebagai kawasan dengan potensi ekonomi yang tinggi bagi investor. Hal itu disebabkan dengan jumlah pertumbuhan ekonomi Myanmar

² Rp. 5.858.805.871.500,00 (lima triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

yang tinggi pada tahun 2011 melebihi pertumbuhan rata-rata dunia kala itu yaitu sekitar 7,8%. Terdapat survei dari *United Overseas Bank Ltd* (UOB) mengatakan bahwa banyak pebisnis Asia akan menempatkan bisnisnya di Myanmar yang menunjukkan angka sekitar 70% dalam waktu 2015. Hal itu juga disebabkan adanya liberalisasi ekonomi setelah isolasi selama 5 dekade pada rezim militernya yang kuat. Pertumbuhan investasi asing yang mencapai angka 192,85% pada tahun 2013-2014 menambah bukti peluang pertumbuhan ekonomi yang besar hingga waktu-waktu mendatang (Amri, 2014). Kawasan tersebut dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan investasi bagi investor serta memberikan fasilitas jalan yang lancar, listrik yang memadai dan lain-lainnya. Selain itu untuk memberikan layanan yang memperlancar dalam proses investasi tersebut meliputi pelayanan pendaftaran pajak yang memiliki regulasi lebih jelas dan terpercaya, prosedur bank sentral untuk mempermudah pebisnis terkait keuangan perusahaan mereka, prosedur pengadaan barang ekspor impor serta pelayanan visa dan imigrasi (SEZ, 2019). Oleh karena itu, Jepang mencoba untuk menjalin kerja sama dengan Myanmar melalui bantuan ODAny untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai kawasan yang ramah terhadap investasi asing. Jepang memperhatikan, memahami dan mempelajari kondisi Myanmar dengan menganalisis kebijakan Myanmar dengan sangat baik untuk membangun kerja sama yang lebih baik pula. Dari sinilah dimulainya kerja sama Myanmar dan Jepang yang semakin intensif dan semakin banyak terbentuknya kesepakatan-kesepakatan selanjutnya. (Thant, 2021).

Proyek pengembangan zona ekonomi khusus Thilawa Yangon merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Jepang dan Myanmar. Kerja sama ini dilakukan dengan penyaluran bantuan ODA oleh Jepang kepada Myanmar. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulisan ini akan berfokus untuk menjawab rumusan masalah "Mengapa pemerintah Myanmar dan pemerintah Jepang melakukan kerja sama melalui bantuan ODA di proyek pengembangan SEZs Thilawa Yangon?". Dengan

adanya tulisan ini, diharapkan dapat diketahui alasan kedua negara melakukan kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Myanmar terhadap bantuan ODA dalam proyek SEZs Thilawa.

KERANGKA BERPIKIR

Teori Liberalisme

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis kerja sama pemerintah Myanmar dan Jepang pada proyek pengembangan SEZs Thilawa Yangon melalui *Official Development Assistance* (ODA) Jepang adalah liberalisme. Teori ini meyakini bahwa perdamaian dunia dapat dicapai tanpa harus melalui perang. Liberalisme meyakini bahwa pada dasarnya, manusia memiliki sifat dasar yang baik dan negara terbentuk dari kumpulan manusia yang mempunyai sifat baik. Oleh karena itu, untuk mencapai perdamaian, liberalisme mengutamakan kerja sama dan berusaha untuk menghindari perang.

Salah satu ciri dari teori liberalisme adalah percaya bahwa hubungan internasional lebih bersifat kooperatif dibandingkan konflikual (Jackson & Sorensen, 1999). Berdasarkan perspektif ini, maka liberalisme sangat menjunjung tinggi kemajuan setiap individu. Setidaknya terdapat tiga hal yang mendasari teori liberalisme dan menyatakan bahwa hubungan internasional lebih bersifat kooperatif daripada konflikual, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Dengan menjunjung tinggi ketiga hal dasar tersebut, maka setiap individu dapat membentuk sebuah kelompok yang saling memberikan kebahagiaan dengan menyatukan kepentingan bersama yang mereka miliki. Maka dari itu, hubungan antar negara pun dapat dilakukan dengan menyatukan kepentingan bersama yang mereka miliki demi mencapai suatu tujuan tertentu.

Selain itu, Jackson and Sorensen (2009) juga menyatakan bahwa terdapat beberapa asumsi dasar liberalisme. Pertama, liberalisme meyakini bahwa sifat dasar manusia adalah baik. Kedua, liberalism percaya pada kemajuan. Ketiga, liberalisme

meyakini bahwa hubungan internasional bersifat kooperatif dan bukan konfliktual. Liberalisme meyakini bahwa kemajuan yang ingin dicapai adalah kemajuan di bidang kehidupan. Sementara itu, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan adanya kerja sama antar aktor internasional.

Menurut Manbasch dan Rafferty (2008) liberalisme percaya bahwa aktor internasional dapat menekankan pemenuhan atas kebutuhan absolutnya dan mendapatkan keuntungan bersama dari suatu hubungan internasional. Liberalisme juga percaya bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dapat diajak bekerja sama satu sama lain demi mencapai kemakmuran dan stabilitas nasional. Adanya keuntungan yang dirasakan oleh masing-masing pihak dalam rangka kerja sama ini kemudian menyebabkan kondisi saling ketergantungan antar aktor-aktor internasional. Dengan motif untuk memenuhi kebutuhan absolutnya, kerjasama dalam suatu hubungan internasional merupakan pertemuan keuntungan yang dilakukan oleh berbagai aktor yang terlibat di dalamnya. (Dunne, 2001)

Penerapan teori liberalism dapat dilihat dalam proses kerja sama Jepang dan Myanmar dalam proyek pembangunan SEZs Thilawa Yangon. Kerja sama ini merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya. Melalui ODA, Jepang dapat menjalankan kewajibannya untuk melakukan kebijakan pampasan perang yaitu pengembalian hak-hak atau dapat dikatakan sebagai ganti rugi yang harus dibayar Jepang kepada Myanmar atas balasan dari penjajahan yang dilakukan Jepang kepada Myanmar pada jaman dahulu. Selain itu, melalui bantuan ODA ini, Jepang dapat memperbaiki hubungan agar semakin baik dengan Myanmar untuk kemudian bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan nasional Jepang. Sementara itu, melalui kerja sama ini, Myanmar memiliki keuntungan langsung, yaitu dapat melakukan pembangunan di negaranya. Dalam hal ini, keuntungan yang dirasakan Myanmar berkaitan dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus untuk pengembangan industrialisasi negaranya.

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional menurut Hans J Morgenthau adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik dan kultural dari gangguan negara lainnya. Berdasarkan tinjauan tersebut maka pemimpin negara menentukan kebijakan spesifik terhadap negara lain, sehingga dengan kata lain “kekuatan” adalah pilar utama dalam bidang politik nasional maupun internasional yang realistis serta dipenuhi pertentangan untuk menanamkan pengaruhnya di suatu kawasan. Kepentingan nasional menjadi sangat berpengaruh dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, politik, pertahanan keamanan, maupun ekonomi. Secara umum negara yang membawa kepentingan nasionalnya cenderung melakukan intervensi terhadap suatu kawasan. Kepentingan nasional menjadi unsur yang sangat vital bagi suatu negara. Unsur-unsur tersebut meliputi kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan, keamanan militer, kesejahteraan ekonomi, kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian kepentingan nasional diatas, maka intervensi yang dilakukan oleh Jepang merupakan intervensi yang berdasarkan pada kepentingan nasional. Dalam hal ini adalah untuk mewujudkan kepentingan ekonomi negaranya, Jepang menggandeng Myanmar untuk melakukan kerja sama untuk membangun zona perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan Jepang di Myanmar. Pada saat itu, Jepang yang merupakan negara perekonomian terbesar di dunia mengalami ketegangan, para pekerja/ SDM yang sudah memasuki usia lansia harus pensiun dan menerima gaji pensiun secara berkala sebagai bentuk pertahanan hidup, munculnya populasi SDM tersebut mengakibatkan perekonomian Jepang kian merosot. Hal itu ditandai dengan banyaknya perusahaan Jepang yang bangkrut karena kurangnya tenaga kerja, permasalahan tersebut membuat Jepang berupaya untuk membuka kerja sama internasional sebagai bentuk kepentingan ekonomi negaranya.

Pada tahun 2011, Myanmar merupakan negara yang menjadi incaran Jepang untuk menjalankan kebijakan luar negeri dengan melakukan Kerja sama bilateral. Kerja sama yang dilakukan kedua negara dapat memberikan akses bagi perusahaan swasta

Jepang untuk melakukan ekspansi. Dalam hal ini, Jepang menjalin hubungan kerja sama dengan Myanmar untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya yaitu memberikan tempat bagi perusahaan atau pengusaha Jepang mengembangkan perusahaan swastanya dan mendapatkan tenaga kerja di Myanmar. Di sisi sebaliknya, Myanmar mendapatkan keuntungan tumbuhnya wilayah perekonomian baru yang bisa mendatangkan keuntungan besar di masa mendatang. Myanmar mendapatkan dana investasi dan bantuan yang besar dengan cepat untuk menciptakan lingkungan perekonomian yang besar untuk masyarakatnya.

Sebenarnya pada saat Jepang ingin menjalin hubungan kerja sama dengan Myanmar, perekonomian Myanmar dalam keadaan tidak stabil, Myanmar juga banyak diberikan sanksi ekonomi oleh negara Barat lainnya. Namun, permasalahan yang tengah dihadapi oleh Myanmar tidak membuat Jepang untuk membatalkan kerja sama tersebut. Keinginan Jepang yang sangat ingin melakukan Kerjasama dengan Myanmar dikarena Jepang meyakini bahwa Myanmar dapat memberikan potensi yang besar bagi perkembangan perekonomian negaranya, walaupun kebutuhan SDM yang diperlukan Jepang sangat bertolak belakang dengan Myanmar. Padahal saat itu, Myanmar merupakan negara yang sedang mengalami kecaman internasional karena perekonomiannya. Selain itu juga, pada tahun 2017 perusahaan Jepang sempat melakukan investasi di Myanmar. Kerja sama yang sering dilakukan kedua negara tidak semata-mata hanya untuk mewujudkan kepentingan satu pihak saja namun kerja sama yang dilakukan oleh Myanmar dan Jepang merupakan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Investasi merupakan salah satu kerja sama yang dilakukan Jepang kepada Myanmar, yang menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi seperti dilakukannya investasi infrastruktur. Dalam hal ini infrastruktur merupakan sebuah bentuk kerja sama kedua negara untuk melakukan pembangunan zona ekonomi khusus (SEZs) Thilawa Yangon.

Kepentingan nasional yang dilakukan Jepang tersebut bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja pada saat terjadinya beberapa permasalahan SDM di Jepang, tetapi dalam hal ini Jepang telah memiliki keputusan-keputusan rasional yang telah

direncanakan sebelumnya. Pada awalnya bahwa Jepang telah memberikan bantuan luar negeri kepada Myanmar. Namun karena Myanmar bantuan luar negeri Jepang belum dikembalikan oleh Myanmar membuat Jepang mengambil keputusan untuk menggunakan kebijakan luar negeri. Dari kebijakan luar negeri tersebut terputuslah untuk menghapus hutang luar negeri Myanmar. Hal itu dilakukan Jepang untuk memperlancar kepentingan nasional Jepang dengan melakukan kerja sama antar negara. Hal itu ditandai dengan dilakukannya proyek pembangunan SEZs Thilawa Yangon sebagai salah satu pembangunan yang dilakukan atas kerja sama Jepang dan Myanmar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis data-data berupa fakta yang berasal dari sumber data sekunder. Pencarian fakta dari sumber terpercaya berupa penelitian dan laporan sebelumnya terkait dengan subjek utama analisis dalam menganalisis fenomena yang menjadi subjek penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis topik bahasan dengan kerangka teori yang digunakan. Hal ini akan memudahkan penulis dalam melihat fakta-fakta tindakan atau perilaku yang dapat dijadikan motif dari Myanmar maupun Jepang dari sumber bacaan yang ada. Setelah mendapatkan data-data dari sumber bacaan dari metode kualitatif yang dilakukan, lalu dianalisis dengan deskripsi yang mendalam untuk memberikan gambaran penjelasan terkait variabel yang akan dibahas yaitu motif yang dilakukan dengan alasan yang mendasari perilaku yang terjadi.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian berasal dari kajian studi pustaka yang berasal dari data-data sekunder. Pengambilan data kami lakukan dari sumber online berupa jurnal-jurnal, buku, dokumen yang berasal dari website resmi JICA/ODA di Myanmar, buletin beserta sumber-sumber berita atau data pendukung lainnya.

PEMBAHASAN

A. Motif Kerja Sama Pemerintah Jepang dan Myanmar

Jepang dikenal sebagai negara yang perekonomiannya didukung oleh sektor manufaktur. Diketahui bahwa, setidaknya 61,4 persen produk ekspor Jepang merupakan hasil dari sektor manufaktur (Seekins, 2015). Oleh karena itu, sektor manufaktur merupakan industri utama dalam perekonomian Jepang serta merupakan komoditi utama dalam urusan perdagangan internasional. Pada kenyataannya di Jepang terjadi penurunan jumlah populasi usia produktif yang berimbas pada permasalahan ekonomi. Terjadi kelangkaan tenaga kerja yang mengakibatkan berbagai perusahaan manufaktur Jepang mengalami kendala untuk perekrutan pekerja baru dengan kualifikasi yang sesuai. Maka Jepang mulai mencari tempat baru untuk mengalokasikan para pemilik perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak dengan membuka lingkungan bisnis dan ekonomi baru di Myanmar. Jika proyek ini berhasil maka imbasnya akan kembali dirasakan oleh pebisnis Jepang di bidang manufaktur dan perdagangan yang akan mendapatkan sumber pendapatan baru dan besar di Myanmar (Seekins, 2015).

Akibat menurunnya jumlah tenaga kerja, terjadi penurunan produktivitas pada beberapa perusahaan di Jepang. Hal ini menyebabkan perekonomian Jepang melemah sejak tahun 2010, ditandai dengan penurunan *Gross Domestic Product* (GDP) Jepang yang secara konstan berlangsung. Tidak hanya itu, perekonomian Jepang bahkan merosot hingga menyebabkan posisi Jepang yang semula berada pada peringkat kedua sebagai negara dengan ekonomi terbesar dunia, menurun hingga ke posisi ketiga.

Sebagai langkah untuk menghentikan penurunan ekonomi di Jepang, Shinzo Abe selaku Perdana Menteri Jepang menetapkan kebijakan *Abenomics*³ yang berlangsung sejak tahun 2012 lalu. Saat itu, perusahaan manufaktur Jepang mengalami kesulitan di pasar Amerika Serikat serta pasar Eropa. Berbagai kendala bermunculan, seperti

³ *Abenomics* merupakan kebijakan yang memposisikan kerja sama luar negeri sebagai kebijakan prioritas.

kebijakan Amerika Serikat yang meningkatkan pajak mobil hasil impor melalui Eropa menyebabkan Jepang kehilangan pasar di kawasan Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini mengakibatkan Jepang melihat wilayah lain yang dirasa akan memberikan keuntungan yang cukup besar jika dilakukan kerja sama. Salah satu kawasan yang memiliki potensi besar bagi Jepang adalah kawasan Asia, utamanya Asia Tenggara. Kawasan ini dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar bagi Jepang dalam segi ekonomi dan mengembalikan posisi Jepang sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Dengan demikian terpilihah Myanmar sebagai fokus kerja sama lagi dengan maksimal walau di waktu sebelumnya sudah diadakan kerja sama.

Myanmar dinilai memiliki daya tarik sumber daya alam yang besar terutama sumber energi bahan-bahan mentahnya ditambah tenaga kerja yang melimpah. Hal itu menjadi daya tarik tambahan mengapa Jepang masih tidak dapat meninggalkan Myanmar. Selain itu, pendekatan Jepang ke Myanmar juga dikarenakan kondisi Jepang kala itu mendukung Amerika yang mulai melunak kepada Myanmar yang sebelumnya retak diakibatkan konflik perang di Myanmar. Karena Jepang memanglah sangat dekat dengan Amerika dan melakukan kebijakan yang hampir selalu sama dengan kebijakan Amerika. Dengan kondisi demikian, Jepang bebas mendekati Myanmar lagi untuk menjalin kerja sama ekonomi bersamaan dengan naiknya Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2012 yang memiliki cita-cita memperkuat Jepang di dalam kawasan regional. Hal ini juga dilakukan Jepang untuk meningkatkan posisinya di Myanmar untuk mengimbangi pengaruh China di sana (Seekins, 2015).

Selanjutnya, pemilihan Myanmar sebagai mitra kerja sama Jepang didasari oleh berbagai hal. Jika ditinjau dari sejarahnya, Myanmar dan Jepang telah memiliki histori sejarah yang berawal dari bantuan Jepang sebagai hasil dari pemenuhan pamapasan perang, yang pada sejarahnya Jepang telah menjajah Myanmar kala itu untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk Jepang sendiri. Selain itu, Myanmar dianggap sebagai negara yang penting berdasarkan geopolitiknya serta dianggap akan membantu untuk keluar dari kondisi stagnan ekonominya. Myanmar berada pada posisi yang menghubungkan negara tetangganya seperti Bhutan dan Nepal dengan kondisi tidak

memiliki lautan (*landlocked*). Myanmar sangat berpotensi menjadi negara yang berkembang pesat di kawasan disebabkan berada di antara India dan China yang merupakan negara besar (TIM KAJIAN MANDIRI, 2019). Kondisi geopolitik Myanmar inilah yang kemudian menjadi alasan kuat Jepang untuk bekerjasama dengan negara tersebut. Selain itu, Myanmar juga merupakan negara yang memiliki hubungan cukup erat dengan Tiongkok. Jepang menyadari berbagai potensi yang dimiliki oleh Myanmar serta dampak yang akan ditimbulkan apabila Myanmar semakin memiliki hubungan kedekatan dengan Tiongkok. Dalam upayanya untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara serta mengembalikan posisi ekonominya di dunia, maka Jepang memutuskan untuk bermitra dengan Myanmar dalam berbagai proyek kerja sama. (Elviana, 2014)

Myanmar yang merupakan negara berkembang⁴ berupaya untuk mengembangkan perekonomiannya. Melalui pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko Kikuta ketika mengunjungi Myanmar, Jepang menyatakan untuk membantu Myanmar dalam mengembangkan perekonomian negaranya. Jepang bersedia untuk menginvestasikan 270,283 juta dolar AS⁵ dalam proyek pembangunan zona ekonomi khusus yang tengah dirancang oleh Myanmar. Dengan suku bunga yang cukup rendah, yaitu sekitar 1%, tawaran yang diberikan Jepang disambut baik oleh Myanmar. (Shafira, 2021)

Myanmar menyadari bahwa lokasi negaranya sangat berpotensi besar menjadi tempat pertumbuhan ekonomi modern. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa ia menjadi penghubung antara negara yang tidak memiliki wilayah laut. Maka Myanmar yang memiliki jalur laut melalui pelabuhannya yang berupaya membangun pelabuhan dengan infrastruktur yang memadai agar dapat digunakan sebagai tempat transit banyak perdagangan yang tidak hanya berurusan dengan Myanmar tetapi juga sebagai jalur

⁴ Myanmar memiliki rata-rata pendapatan tahunan sebesar 34,4 juta dolar AS atau sekitar 512.296.840.000.00 rupiah

⁵ Rp. 4.025.149.035.050.00 (empat triliun dua puluh lima miliar 35 juta 50 ribu rupiah)

yang menghubungkan dengan negara tetangga yang tidak memiliki akses jalur laut.(TIM KAJIAN MANDIRI, 2019)

B. Analisis motif dan bentuk kebijakan Jepang dan Myanmar dalam Proyek Pembangunan SEZs Thilawah di Yangon

Myanmar-Jepang telah menyepakati proyek kerja sama pembangunan zona ekonomi khusus atau *Special Economic Zone* (SEZ) di Myanmar atas dasar kebutuhan dan cita-cita keuntungan yang akan mereka hasilkan bersama. Pada kenyataannya Myanmar merupakan negara dengan perekonomian terendah di antara negara – negara di sekitarnya (negara ASEAN) pada tahun 2014. Hal itu disebabkan karena kurangnya beberapa sektor yang mendukung pertumbuhan ekonominya terutama infrastrukturnya. Selain itu juga ada ketrampilan tenaga kerja yang masih rendah serta peraturan hukum maupun undang-undang yang belum tersusun dengan baik. Maka, Myanmar berusaha memperbaiki permasalahan itu satu persatu dan dengan perlahan serta perencanaan yang hati-hati (Amri, 2014).

Ketentuan atau regulasi dibuat untuk proyek SEZ-s Thilawa yang langsung dibentuk untuk menyiapkan pengembangan zona ekonomi khusus di Thilawa ini yang dikendalikan oleh *Myanmar Japan Thilawa Development Co. Ltd.*, (MJTD) yang berhak membangun, menjual atau mengoperasikan tanah-tanah atau kavling di daerah Thilawa. Selain itu, ada Komite Manajemen di Zona Ekonomi Khusus Thilawa dan *Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public* (MTSH) menjadi yang namanya TSEZMC sebagai fasilitator dan koordinator. MMH Thilawa Development Co., Ltd. (MMST), dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebagai pemegang saham MJTD. TSEZMC menjadi badan administratif yang bertugas untuk memberikan izin kepada investor serta memfasilitasi segala proses untuk menjalankan bisnis termasuk tindakan-tindakan pemulihan atau yang lain dan perlu dilakukan di zona ekonomi spesial Thilawa. Zona ekonomi khusus Myanmar di bangun di kota Thilawa 25 km ke Selatan Yangon, kota terbesar di Myanmar. Thilawa SEZ dibangun diatas lahan seluas 6000 hektar dengan luas bangunan 2.400 hektar yang terdiri dari pelabuhan dan kawasan industri. (Thant, 2021)

Pemerintah Myanmar telah membuat Undang-Undang mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI) pada 2 November 2012 dengan tujuan menarik investor asing dengan kemudahan-kemudahan proses yang ditawarkan untuk menanamkan modalnya di Myanmar. Melihat peluang pertumbuhan ekonomi di Myanmar yang besar, Jepang merasa ini adalah kesempatan yang bagus baginya untuk segera memberikan bantuan sehingga segera dibangun infrastruktur yang dapat segera digunakan dan mencapai harapan wilayah dengan tingkat investasi dan perekonomian tinggi. Myanmar memang memerlukan perbaikan di segala bidang untuk untuk mendukung cepatnya pertumbuhan ekonomi di sana, hal itu sejalan dengan pendapat Ivan Chu yang merupakan seorang Manajer Operasi Bisnis di sebuah perusahaan bernama Soon Hong Seng Pvt Ltd. (Amri;, 2014). Maka, Myanmar mulai membuka tawaran investasi kepada Jepang yang digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung dibangunnya beberapa proyek di sana. Jepang melalui JICA (*Japan International Cooperation Agency*) memberikan pinjaman lebih dari 51 miliar yen atau sekitar 5,8 triliun rupiah dalam bentuk bantuan pembangunan resmi ODA kepada Myanmar. Dari pinjaman ODA ini, 20 miliar yen atau sekitar 2,3 triliun rupiah akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Thilawa SEZ. Selain itu, sembilan perusahaan publik Myanmar dan konsorsium tiga perusahaan Jepang yang terdiri dari Mitsubishi, Marubeni dan sumitomo setuju untuk bersama-sama mengembangkan Myanmar Thilawa SEZ. (Thant, 2021)

Proyek SEZ merupakan sebuah tonggak hubungan bilateral antara Myanmar dan Jepang, menciptakan lapangan kerja dan menyediakan teknologi tinggi untuk penduduk setempat dalam mengembangkan proyek SEZ. Proyek ini termasuk pabrik, industri teknologi tinggi, tekstil, industri padat karya dan industri manufaktur. Bantuan pembangunan yang terkait dengan kerja sama di sektor swasta meningkatkan kesempatan kerja, transfer teknologi dan keuntungan bersama sebagai tujuan pemerintah Myanmar adalah untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang dapat memberikan kontribusi bagi manfaat maksimal untuk semua lapisan masyarakat, dan

selesaiannya SEZ Thilawa didefinisikan sebagai keberhasilan kerja sama dan implementasi yang baik. (Thant, 2021)

Pada proyek pembangunan ini, pemerintah Myanmar dan pemerintah Jepang masing-masing terlibat 10% sebagai pemegang saham dalam infrastruktur dan operasi internal. Dalam proyek ini membentuk sebuah nama konsorsium *Myanmar-Jepang Thilawa Development Co Ltd* (MJTD) di Yangon, yang didalamnya ada dua perusahaan Myanmar dan dua lainnya merupakan mitranya Jepang. Pada proyek ini Myanmar memegang 51% saham, sementara Jepang memegang 41% pada konsorsium tersebut. Proyek pembangunan SEZ Thilawa akan menjadi pusat industri berteknologi tinggi untuk berbagai manufaktur seperti tekstil. (Thant, 2021)

Proyek utama pembangunan infrastruktur dibangun atas prakarsa kedua negara Myanmar dan Jepang. Aturan yang dibuat atas kesepakatan dan regulasi sesuai permintaan masing-masing. Proyek-proyek yang dijalankan meliputi:

1. Proyek kelistrikan

Faktor utama dalam untuk memajukan kawasan Thilawa adalah industri listrik. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Thilawa serta menciptakan lapangan kerja di Greater Yangon. Fasilitas ini dibangun untuk menyokong pasokan listrik di wilayah kota industri yang baru untuk digunakan di berbagai sektor pembangunan dan kebutuhan untuk menunjang segala kehidupan di sana. Jalur distribusi sebesar 30 kilovolt dibangun pada 2014-2020, lalu untuk transmisi 230 kilovolt akan dibangun pada tahun 2020. Proyek Pembangunan Tahap III Proyek pembangunan pelabuhan mendapatkan bantuan JICA/ODA dari Jepang pada Maret 2020 untuk mempromosikan listrik lagi di wilayah Thilawa. Kementerian Listrik dan Energi membawahi organisasi yang ikut dalam proyek ini yaitu Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik. JICA dan kementerian Myanmar berkolaborasi dengan baik dengan melakukan pembangunan dengan maksimal sesuai yang diharapkan yaitu dengan menyewa konsultan untuk perencanaan, pengadaan, dan pemasangan peralatan untuk pabrik dan siklus gabungan. (Thant, 2021)

2. Proyek pembangunan pelabuhan

Proyek pelabuhan dilaksanakan atas kerja sama dari Kementerian Konstruksi yang dibantu oleh JICA Jepang. Proyek ini terbagi menjadi dua yaitu, konstruksi dibuat di dua tempat berlabuh & satu yard dan pemasangan untuk peralatan kargo. Pembangunan dibawah pengawasan Otoritas Pelabuhan Myanmar dibawah Kementerian Transportasi dan Komunikasi. Proyek ini selesai pada tahun 2020 dan sudah beroperasi 100% maksimal. (Thant, 2021)

3. Proyek pembangunan jalan

Pembangunan dikerjakan oleh staf dari pihak Jepang dan Myanmar dengan menerapkan fungsi *front office* dan *back office* yang diterapkan dengan transparansi tinggi dan terjamin serta konsultasi yang rinci. Pembangunan diawali dengan uji teknis serta pertimbangan lingkungan dan sosial. Pembangunan jalan dilakukan dengan empat lajur sepanjang 8,7 km. Jalan dibangun dengan di aspal secara keseluruhan, memperbaiki trotoar, sambungan kabel listrik & telekomunikasi di bawah tanah. Jalur ini dibuka pada Mei 2019 dan 80% dari keseluruhan proyek akan selesai pada tahun 2020. Pembangunan ini dilakukan untuk meningkatkan transportasi, teknologi di Kawasan kerja sama Jepang-Myanmar pada saat itu. (Thant, 2021)

C. Hambatan Yang Terjadi Antara Jepang dan Myanmar dalam Perencanaan Kerja Sama Proyek Pengembangan SEZs Thilawa Yangon

Dapat di ulas Kembali bahwa JICA *Japan International Cooperation Agency* pada bantuannya ke Myanmar sepakat untuk memberikan pinjaman sebesar 51 miliar yen atau sekitar 5,8 triliun rupiah dalam bantuan ODA kepada Myanmar. Dalam pinjaman yang diberikan oleh ODA bahwa 20 miliar yen atau sekitar 2,3 triliun rupiah pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Thilawa SEZ. Selain itu, 14,052 miliar yen sekitar 1,6 triliun rupiah untuk proyek peningkatan jaringan listrik dan stasiun di Yangon. Pada proses pembangunan SEZ terdapat 9 perusahaan Myanmar dan 3 perusahaan Jepang yang turut setuju untuk bersama-sama mengembangkan pembangunan Myanmar Thilawa SEZ.

Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan antara kedua negara untuk menuju terwujudnya pembangunan SEZs Thilawa Yangon. Hubungan kerja sama antara Jepang dan Myanmar telah terbentuk sejak tahun 1954 namun pada tahun 1988 hubungan antar keduanya memiliki kerenggangan dikarenakan terdapat isu-isu demokrasi dan pelanggaran HAM di Myanmar. Permasalahan yang terjadi di Myanmar membuat Jepang mencabut bantuan yang telah diberikan oleh Jepang kepada Myanmar pada saat masih berhubungan baik. Sebelum terjadinya pembekuan bantuan tersebut, Jepang telah memberikan bantuan pinjaman hutang bersifat lunak, di mana bantuan pinjaman hutang tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Myanmar. Hal itu semua akan dijelaskan lebih lanjut dibawah.

Pada saat Myanmar terlibat dalam permasalahan yang membuat Jepang membekukan pinjaman hutang lunak tersebut, Myanmar yang pada saat itu masih dikuasai oleh Junta militer Kembali membuat Jepang marah. Hal itu dikarenakan, Junta militer menggunakan pinjaman hutang luar negeri dari Jepang digunakan untuk pengadaan kendaraan tempur khusus perang. Sehingga bantuan luar negeri sebesar 5 miliar USD (74 triliun lebih dalam rupiah). Kembali dibekukan oleh Jepang. Jepang melakukan pembekuan bantuan luar negeri tersebut juga dikarenakan ada sebab lain. Dimana sebab tersebut yaitu sebuah bentuk atau aksi protes dari Jepang kepada Myanmar karena terbunuhnya 3000 masyarakat sipil oleh tentara Myanmar pada saat terjadinya sebuah demonstrasi ketika pemilu yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah. (Afrizal, 2012-2013)

Selanjutnya Myanmar melakukan serangkaian pemilu setelah adanya penentangan junta militer dari salah satu tokoh Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi. Setelah pemilu dilakukan sikap Jepang kepada Myanmar Kembali mulai bersikap lunak. Pada saat itu Jepang pun mulai memberikan bantuan Kembali kepada Myanmar sebesar 71,6 juta dolar AS⁶ secara berkala (elviana, 2013). Menurut Jepang, bantuan yang mereka berikan pasca pemilu merupakan sebuah bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Myanmar.

⁶ Rp. 1.066.546.440.000.00 (satu triliun enam puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Namun pemilu demokrasi sebelumnya tidak berjalan sesuai kehendak, junta militer juga memberikan hukuman dan peradilan tidak yang jelas terhadap Suu Kyi karena telah melakukan penentangan terhadap junta militer. Akibatnya Jepang dan Myanmar Kembali memiliki hubungan yang buruk. Hal itu juga yang membuat Jepang mengambil kebijakan untuk mencabut dan membatalkan semua rencana bantuan luar negeri terhadap Myanmar.

Akibat dari pencabutan bantuan dari Jepang mengakibatkan perekonomian Myanmar memburut dengan sangat pesat. Tidak hanya Jepang yang tidak memberikan bantuan kepada Myanmar pada saat itu, namun juga negara internasional lainnya juga ikut terlibat tidak memberikan bantuan. Akibatnya Myanmar mengalami kesulitan dan kerumitan dalam menuntaskan masalah ekonomi, sehingga Myanmar terpaksa melakukan referendum terhadap konstitusi dan melakukan pemilu kembali dengan kebijakan *Roadmap to Democracy*. Adanya kebijakan tersebut membuat Thein Sein terangkat menjadi presiden Myanmar dan terjadinya pembubaran junta militer oleh Thein Sein.

Pembubaran junta militer dianggap sebagai sejarah baru dalam demokrasi yang dianggap positif dari beberapa pihak internasional, lalu, Thein Sein juga melakukan kunjungan luar negeri pertama setelah menjadi presiden Myanmar ke Jepang. Kunjungan tersebut juga dilakukan bersama dengan penghapusan pinjaman luar negeri Myanmar. Jepang menghapus hutang luar negeri Myanmar secara bertahap. Dimulai pada tahun 2012 dan disusul tahap kedua pada tahun 2013. Selanjutnya, Jepang juga telah mencabut kebijakan pembekuan bantuan luar negeri kepada Myanmar.

Dengan adanya penghapusan utang luar negeri Myanmar, kedua negara telah melewati serangkaian proses pengambilan keputusan. Kemudian dari hal itu, Jepang telah membuat sebuah interaksi internasional. Dimana interaksi tersebut berupa sebuah kepentingan nasional Jepang sehingga terbentuknya kembali kerja sama antara Jepang dan Myanmar. Myanmar merupakan negara yang baru saja terlepas dari junta militer berusaha untuk mencari beberapa pinjaman lunak luar negeri, sehingga melihat itu

Jepang menganggap hal tersebut sebagai bentuk kerja sama yang akan menguntungkan. Jepang juga sangat menjaga hubungannya dengan Myanmar untuk mendapatkan kepercayaan yang baik guna untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Kerja sama yang terbentuk pasca banyaknya hambatan yang terjadi terhadap Myanmar sampai membuat Myanmar mengalami kesulitan telah teratasi. Pasca terjadinya hambatan tersebut terbentuknya kerja sama Jepang dan Myanmar dalam pembangunan infrastruktur di Myanmar. Kerja sama tersebut berupa sebuah proyek pembangunan SEZ di Myanmar. Kerja sama yang dilakukan kedua negara sangat berkompeten dan konsisten sehingga berhasilnya terbangun proyek Zona Ekonomi Khusus (SEZ) di Thilawa Yangon dengan sukses dan tanpa hambatan yang berarti. Hambatan ini dalam memulai kerja sama muncul karena adanya junta militer. Pada saat itu juga, junta militer menggunakan bantuan yang diberikan kepada Myanmar untuk memenuhi kebutuhan yang tidak produktif.

D. Keuntungan Jepang dan Myanmar dalam Kerja Sama Proyek Pengembangan SEZs Thilawa Yangon

Kerja sama yang dilakukan oleh Myanmar dan Jepang dalam pembangunan proyek SEZ melalui bantuan ODA memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dari pihak Myanmar, proyek pembangunan SEZ ini bertujuan untuk menarik investor asing agar dapat menyokong pembangunan negara. Melalui bantuan yang diberikan oleh Jepang, Myanmar dapat mewujudkan terciptanya Kawasan Ekonomi Khusus yang mendorong terciptanya pengembangan industrialisasinya. Hukum dan regulasi yang jelas menciptakan sebuah lingkungan investasi yang sangat baik sehingga hal itu menarik investor lokal dan investor asing untuk menghidupkan kawasan kota yang maju.

Tawaran bantuan dari Jepang sangatlah membantu pembangunan di Myanmar. Dengan suku bunga yang rendah, yaitu serendah satu persen menyebabkan Myanmar menyambut baik tawaran dari Jepang ini. Rendahnya angka suku bunga yang diberikan oleh Jepang memberikan keuntungan sendiri, yaitu pengembalian biaya yang nantinya dilakukan oleh Myanmar tidak akan begitu besar. Kerja sama yang dilakukan Jepang dan

Myanmar ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam rangka keberhasilan proyek pembangunan semata. Kerja sama ini juga sekaligus dapat menjadi sarana transfer teknologi unggul milik Jepang ke Myanmar.

Kondisi geopolitik Myanmar juga menguntungkan Jepang untuk meletakkan pengaruhnya sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh ekonomi dari Tiongkok di Asia Tenggara. Ketika aliran bantuan dari Jepang dan negara-negara barat menurun seiring dengan periode kekuasaan Junta Militer, Tiongkok merupakan penyedia bantuan utama sekaligus investor terbesar Myanmar. Sejak saat inilah Myanmar memiliki posisi penting, yaitu sebagai "pion" antara Tiongkok dan aliansi Jepang, Amerika Serikat. Dengan bekerja sama bersama Myanmar, maka Jepang turut meletakkan pengaruhnya di negara ini dan menahan pengaruh kekuasaan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. (Seekins, 2015)

Selain itu, melalui kerja sama ini, Jepang berhasil menjadi investor utama dalam proyek SEZs Thilawa. Jepang memegang 41% saham yang menjadikan Jepang mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup besar dalam proyek tersebut (Seekins, 2015). Perusahaan-perusahaan Jepang pun dipercaya untuk mengerjakan proyek tersebut. Setidaknya terdapat berbagai perusahaan yang menandatangani perjanjian kerja sama untuk proyek SEZs Thilawa, yaitu Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo, Oshimaya Co., ASMO Co. Ltd, METACC Manufacturing, dan JEF Engineering. Selain itu, perdagangan antara Jepang dan Myanmar juga terus tumbuh seiring dengan kerja sama tersebut. Jepang berhasil meningkatkan ekspor ke Myanmar hingga 1.053 miliar dolar atau sekitar 15 triliun lebih dalam rupiah. Keuntungan-keuntungan ini tentunya menguntungkan bagi perekonomian di Jepang. (Seekins, 2015)

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, Jepang dan Myanmar menjalin kerja sama melalui bantuan ODA pada proyek pembangunan SEZs Thilawa di

Yangon. Liberalisme setiap negara memiliki naluri untuk selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan negaranya dengan bekerja sama dengan negara lain. Hal itu tercermin oleh Jepang yang mencari tempat baru untuk dijadikan pasar dan tempat bagi masyarakatnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang kurang terpenuhi dalam negerinya. Pertimbangan lain adalah ketika Jepang juga ingin menanamkan pengaruhnya di negara-negara lain (disini Myanmar) dengan paham liberal seperti dirinya dan juga tujuannya untuk kembali kepada perekonomian agar negara tersebut dapat terus memberikan keuntungan dalam sebuah kerja sama yang berakar kuat. Pada zaman sekarang memang dunia internasional memiliki kecenderungan lain untuk menanamkan pengaruhnya pada negara lain dengan pengaruh ekonomi yang besar dibandingkan dengan pengaruh militer. Myanmar sebagai negara berkembang yang ingin memajukan negaranya dengan teknologi dan pembangunan yang canggih akan membuka segala cara untuk menarik negara lain dengan aturan kerja sama atau pembukaan investasi yang dipermudah untuk menjadikan Myanmar maju seperti negara maju lainnya (disini adalah Jepang). Myanmar membuka kerja sama dengan Jepang dengan regulasi yang cukup jelas dengan tetap melibatkan perusahaan atau pihak swasta Myanmar yang berperan cukup besar dengan berkolaborasi dengan perusahaan Jepang untuk menjalankan proyek.

Kerja sama yang dilakukan oleh Myanmar dan Jepang ini merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Myanmar memiliki kondisi negara yang sangat potensial ditanamkan sebuah proyek ekonomi yang besar. Masyarakat Myanmar yang sebelumnya hanya mendapatkan pendapatan dari pekerjaan yang seadanya atau bahkan kurang layak, kini mereka dapat memilih pekerjaan yang lebih beragam pada seluruh bagian dari pembangunan proyek ini. Perusahaan Jepang beserta ahli teknologinya yang merupakan masyarakat Jepang sendiri mendapatkan pasar atau tempat tinggal baru yang tentunya membawa keuntungan juga bagi pemerintah Jepang.

Pada saat dilaksanakannya proyek pembangunan SEZs (Zona Ekonomi Khusus) Thilawa Yangon, tidak ada hambatan yang berarti atau tidak terjadinya hambatan yang

membuat proyek pembangunan tersebut terhenti. Justru hambatan terjadi sering terjadi pada sebelum proyek kerja sama ini dilakukan, hal itu disebabkan karena kondisi politik dan pemerintahan Myanmar yang membuat Jepang tidak nyaman untuk melakukan kerja sama. Kerja sama yang banyak dilakukan dalam pemberian dana dari Jepang sangat beresiko untuk disalahgunakan oleh birokrasi di Myanmar, sehingga hal itulah yang membuat Jepang kadang merasa ragu. Namun, setelah adanya pembicaraan dan perjanjian yang memang dilakukan sesuai dengan aturan yang benar, maka kerja sama akan tetap berjalan dengan lancar.

Myanmar dan Jepang dapat terus menjalankan kerja sama yang membawa pada banyak keuntungan dengan menjalankan setiap proyek pada perjanjian yang jelas dan dalam jangka waktu yang jelas bagi setiap perusahaan Myanmar dan Jepang di dalam setiap proyek tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari penghentian kerja sama yang mendadak akibat gejolak politik yang terjadi di Myanmar. Namun, sebelum itu Myanmar juga perlu menstabilkan keadaan politik dalam negaranya. Hal itu jelas diperlukan karena melihat hambatan yang terjadi banyak disebabkan oleh gejolak politik yang menyebabkan Jepang menarik ulur bantuan serta kerja sama yang diberikan dan dilakukan dengan Myanmar. Sehingga tercapailah pembangunan dan kerja sama yang berkelanjutan hingga dampaknya akan menciptakan keuntungan yang besar bagi kehidupan yang lebih panjang kedepan. Lalu yang terakhir, topik penelitian ini diharapkan pembaca dapat menemukan sumber untuk meneliti topik selanjutnya. Pembaca juga dapat melanjutkan penelitian mengenai perkembangan Zona Ekonomi Khusus (SEZs) setelah selesainya pembangunan di Thilawa Yangon.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, I. S. (2014). Asian Tourism Forum: Memanfaatkan Momentum Pertumbuhan Industri Pariwisata ASEAN. In E. R. Ahmad Firman Sejati, Didik Trimardjono, Hari Budiarto (Ed.), *Buletin Komunitas ASEAN: Geliat Bisnis di ASEAN* (5th ed.). MEDIA PUBLIKASI DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI.

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9NYWphbGFoL01hamFsYWgIMjBNYXN5YXJha2F0JTlwQVNFQU4vTWfQYWxhaCUyME1hc3lhcmFrYXQIMjBBU0VBTiUyMEVkaXNpJTlwNS5wZGY=Asada>

Ahmad Firman Sejati, Didik Trimardjono, Hari Budiarto (Ed.), *Buletin Komunitas ASEAN: Geliat Bisnis di ASEAN* (5th ed.). MEDIA PUBLIKASI DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI.

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9NYWphbGFoL01hamFsYWgIMjBNYXN5YXJha2F0JTlwQVNFQU4vTWfQYWxhaCUyME1hc3lhcmFrYXQIMjBBU0VBTiUyMEVkaXNpJTlwNS5wZGY=>

Bisnis, G., Asean, D. I., & Utama, L. (2014). Asian Tourism Forum: Memanfaatkan Momentum Pertumbuhan Industri Pariwisata ASEAN. In *Buletin Komunitas ASEAN: Geliat Bisnis di ASEAN*.

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9NYWphbGFoL01hamFsYWgIMjBNYXN5YXJha2F0JTlwQVNFQU4vTWfQYWxhaCUyME1hc3lhcmFrYXQIMjBBU0VBTiUyMEVkaXNpJTlwNS5wZGY=>

Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997. *Contending Theories*. New York: Harper and Row Publisher.

Elviana, N., & A. (2014). *Kepentingan Jepang Menghapus Hutang Luar Negeri Myanmar Tahun 2012-2013*, 1(2355-6919), 1st ser.,.

Feby Artharini, N. (2021). Perbandingan Foreign Direct Investment Negara Myanmar Dengan Indonesia. *Tanjungpura Law Journal* /, 5, 214–247. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>

H. (2018). Determinants of Foreign Direct Investment Inflows to Myanmar. *Bulletin of Applied Economics*, 8 (1), 19–28. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76493-1_3

International, A., Law, F., & Dec, L. (2013). *Myanmar 's new investment law analysed*. 1–3. <https://doi.org/1870788056>.

Japanese ODA to Fund Myanmar's Infrastructure. Myanmar Times. <https://www.mmtimes.com/business/3756-japanese-oda-to-fund-nation-s-infrastructure.html>

Lee, A. (2013). *Myanmar's new investment law analysed*. 1–3. <https://doi.org/1870788056>

Maghfiratunisa Haq. (2016) [Persaingan Lazada dan Rakuten Dalam Menguasai Pasar E-Commerse Di Indonesia Periode 2012-2014](#). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

MANDIRI, T. K. (2019). *Connecting the Connectivity in the Indo-Pacific: Indian Ocean and Rim Chapter* (I. S. I. M. N. S. A. P. A. G. W. P. W. B. R. N. B. K. S. I. H. C. A. T. A. F. Sari (ed.)). PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA BPPK KEMENTERIAN LUAR NEGERI. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBLL1AzSzIIMjBBU1BBU0FGLzIwX0NvbW5lY3RpbmclMjB0aGUIMjBjb25uZW50aXZpdHklMjBpbUyMHRoZSUyMEluZG8tUGFjaWZpYy5wZGY=>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2013. *"Myanmar: The Future of a Frontier Supported by Public-Private Partnership" dalam Japan's Official Development Assistance White Paper 2013*. https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2013/html/honbun/b1/s2_3.html.

Myanmar-Jepang akan Kerja Sama di Berbagai Bidang. (2013). Antara Sumbar.

<https://sumbar.antaranews.com/berita/58887/myanmar-jepang-akan-kerja-sama-di-berbagai-bidang>.

Myanmar-Jepang Tandatangani Mou Bangun SEZ Thilawa. (2013). Antara Sumbar.

<https://sumbar.antaranews.com/berita/40592/myanmar-jepang-tandatangani-mou-bangun-sez-thilawa>.

Primus, Josephus. (2013). "*Myanmar Siap Operasikan Zona Ekonomi Khusus Thilawa*".

<https://internasional.kompas.com/read/2013/12/10/1246378/Myanmar.Siap.Operasikan.Zona.Ekonomi.Khusus.Thilawa>.

Purwadi, Raden Iding. (2015). *Kepentingan Jepang Dalam Pemberian Bantuan Oda (Official Development Assistance) Terhadap Proyek Mrt (M.Ass Rapid Transit) Jakarta*. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Quazi, R. M., Ballentine, W. E., Bindu, F., & Blyden, L. (2019). Multilateral Foreign Aid, Bilateral Foreign Aid, and Foreign Direct Investment in Latin America. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9 (2), 284–290. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7520>

Saga, Masrsiana Marnitta (2011) *Upaya Jepang Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Asia Tenggara*. Other thesis, UPN "VETERAN" Yogyakarta.

Seekins, D. M. (2015). Japan's Development Ambitions For Myanmar: The Problem of "Economics Before Politics." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 34(2), 113–138. <https://doi.org/10.1177/186810341503400205>

SEZ, T. (2019). *Welcome to Thilawa, Welcome to Myanmar*. Thilawa SEZ. <https://www.thilawasez.gov.mm/>

Shafira, Salsabila (2021) *Motif Bantuan Luar Negeri Jepang Terhadap Myanmar Melalui Japan Official Development Assistance (ODA)*. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Shimbun. A.T. (2021). Japan To Suspend New Myanmar Oda Projects But Says Not Sanction. <https://www.asahi.com/Ajw/Articles/14219640>

Suratno, R. A. (2017). Kepentingan Ekonomi Jepang Dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta) Di Koto Panjang-Riau (Doctoral Dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Thant, A. A. (2021). *" Effectiveness of Japanese Official Development Assistance (ODA) into Myanmar "* Master of Asia Pacific Studies (Issue March) Ritsumeikan Asia Pacific University
https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=14429&item_no=1&attribute_id=20&file_no=1